



STRATEGI OPTIMALISASI POTENSI WISATA RAWA INDAH ALMOUR MELALUI EDUKASI DAN KOLABORASI PERANGKAT DESA, BUMDES, DAN POKDARWIS

OPTIMAL STRATEGY FOR MAXIMIZING THE TOURISM POTENTIAL OF RAWA INDAH ALMOUR THROUGH EDUCATION AND COLLABORATION WITH VILLAGE AUTHORITIES, VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (BUMDES), AND TOURISM AWARENESS GROUPS (POKDARWIS)

Helmi Zalfa Machfuddiana^{1*}, Agus Afandi²

^{1*2} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya

¹ 04040222063@student.uinsby.ac.id, ²agusafandi66@gmail.com

Article History:

Received: November 08th, 2025

Revised: December 10th, 2025

Published: December 15th, 2025

Abstract: The development of the Rawa Indah Almour tourist area in Alas Sumur Village is carried out to maximize local potential through an educational and collaborative approach, involving village officials, the Village-Owned Enterprise (BUMDes), and tourism awareness groups. This area is positioned not only as a recreational destination but also as a means of community empowerment and strengthening village identity. The approach used is the Asset Based Community Development (ABCD) method, which emphasizes the use of assets and potential already possessed by the village. Activities carried out include tourism education, training in managing village information media, as well as collaborative activities such as mutual clean-up efforts and fishing competitions. The results of this community development demonstrate increased digital capacity, active participation of village institutions, and increased community awareness and ownership of the tourism area. Synergy among local elements is strengthening, fostering cross-community collaboration.

Keywords: *village tourism, local potential development, community participation*

Abstrak

Pengembangan kawasan wisata Rawa Indah Almour di Desa Alas Sumur dilakukan untuk memaksimalkan potensi lokal melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif dengan melibatkan perangkat desa, BUMDes, serta kelompok sadar wisata. Kawasan ini diposisikan tidak hanya sebagai destinasi rekreasi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan penguatan identitas desa. Pendekatan yang digunakan adalah metode Asset Based Community Development (ABCD) yang menekankan pemanfaatan aset dan potensi yang telah dimiliki desa. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi edukasi desa wisata, pelatihan pengelolaan media informasi desa, serta kegiatan kolaboratif seperti kerja bakti dan lomba memancing. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan kapasitas digital, partisipasi aktif lembaga desa, serta meningkatnya kesadaran dan rasa memiliki masyarakat terhadap kawasan wisata. Sinergi antar unsur lokal semakin kuat dan

mendorong kerja sama lintas komunitas. Ke depan, diperlukan keberlanjutan program berbasis partisipasi masyarakat dan penguatan digital untuk mendukung pengembangan wisata desa yang berkelanjutan.

Kata Kunci: wisata desa, pengembangan potensi lokal, partisipasi masyarakat

PENDAHULUAN

Pariwisata saat ini telah berkembang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gaya hidup masyarakat modern. Aktivitas berwisata yang sebelumnya dipandang sebagai kebutuhan sekunder atau tersier kini mengalami pergeseran makna menjadi kebutuhan primer, khususnya bagi masyarakat perkotaan yang dihadapkan pada tekanan kerja tinggi, ritme hidup yang cepat, serta kompetisi yang semakin intens. Keterbatasan waktu luang dan kejemuhan terhadap rutinitas harian mendorong masyarakat untuk mencari pengalaman baru yang mampu memberikan relaksasi dan pemulihuan psikologis. Dalam konteks tersebut, wisata berbasis alam dan budaya semakin diminati karena menawarkan ketenangan, keaslian, serta kedekatan dengan nilai-nilai tradisional yang mulai terpinggirkan oleh modernisasi (Wicaksono dkk., 2023; Wiwin, t.t.).

Sejalan dengan perkembangan tersebut, desa wisata hadir sebagai alternatif destinasi yang relevan dengan tren pariwisata kontemporer yang mengedepankan autentisitas dan harmoni dengan alam. Desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang memiliki karakteristik khas berupa kelestarian tradisi, budaya lokal, serta tatanan sosial yang masih terjaga. Keberadaan kuliner tradisional, aktivitas pertanian, dan pola kehidupan masyarakat menjadi elemen penting yang membentuk identitas desa wisata. Namun demikian, daya tarik utama kawasan wisata pedesaan tetap terletak pada kondisi alam yang alami dan lingkungan yang terpelihara dengan baik (Krisnawati, 2021.).

Pariwisata desa merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan daerah, khususnya dalam mengangkat potensi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Desa wisata menjadi wajah dari kombinasi antara keaslian alam, budaya lokal, dan partisipasi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit desa wisata yang mengalami stagnasi atau bahkan vakum akibat kurangnya pengelolaan, minimnya promosi, dan lemahnya sinergi antar pemangku kepentingan.

Kondisi tersebut terjadi di Desa Alas Sumur, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso. Beberapa tahun terakhir, kegiatan wisata di desa ini mengalami kevakuman meskipun memiliki aset wisata yang potensial, salah satunya wisata Rawa Indah Almour. Almour dikenal sebagai salah satu destinasi wisata pelopor di Bondowoso, bahkan termasuk yang tertua sebelum hadirnya berbagai wisata buatan lainnya. Namun, pesona historis dan keunggulan alamnya kurang dikelola secara optimal. Minimnya keterlibatan perangkat desa sebagai motor penggerak dalam pengelolaan aset wisata menjadi salah satu faktor kunci stagnasi tersebut. Padahal, perangkat desa memiliki peran sentral dalam membentuk kebijakan, menginisiasi program, dan mengkoordinasikan kegiatan masyarakat.

Sebagai upaya untuk membangkitkan kembali potensi tersebut, diperlukan strategi

revitalisasi berbasis kekuatan internal desa. Pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) dipilih karena menitikberatkan pada pengembangan aset yang telah dimiliki desa baik berupa sumber daya alam, budaya, sosial, maupun kelembagaan alih-alih berfokus pada kekurangan. Dalam konteks ini, perangkat desa menjadi elemen strategis karena memiliki kapasitas formal dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan aset desa.

Untuk mendukung keberhasilan program ini, strategi model *pentahelix* digunakan sebagai landasan kolaborasi. Model ini mencakup lima elemen penting: pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media. Melalui keterlibatan semua unsur tersebut, diharapkan terjadi sinergi berkelanjutan dalam membangun kembali pariwisata berbasis desa yang berkelanjutan. Berdasarkan pengabdian yang dilakukan di Kabupaten Batang oleh Rusyidi & Fedryansah, menunjukkan bahwa integrasi antara lima komponen yang ada dalam *pentahelix* penting dalam pengelolaan desa wisata. Perangkat desa memiliki peran sebagai pengambil kebijakan serta koordinator, sedangkan kolaborasi yang terjadi antara akademisi, pemerintah, pelaku usaha (termasuk BUMDES), masyarakat, dan media berpengaruh terhadap efektivitas pengembangan wisata (Rusyidi & Fedryansah, 2018).

Program yang dilaksanakan meliputi edukasi bersama perangkat desa mengenai desa wisata dan strategi model *pentahelix*. Edukasi berfungsi untuk membangun kesadaran dan pemahaman mengenai nilai ekonomi, sosial, dan budaya dari desa wisata. Selain itu, sesi edukasi juga mencakup pelatihan pengelolaan website desa dan pembuatan artikel berita, sebagai langkah awal digitalisasi informasi dan promosi wisata berbasis media daring. Kemampuan perangkat desa dalam mengelola media informasi diharapkan dapat memperkuat eksistensi desa wisata sekaligus meningkatkan keterhubungan dengan publik yang lebih luas.

Sementara itu, aksi kolaboratif seperti bersih-bersih tempat wisata sebagai simbol revitalisasi kawasan wisata. Kegiatan pembersihan lokasi wisata menjadi representasi upaya pemulihan dan perawatan aset fisik desa. Kegiatan partisipatif seperti lomba memancing untuk menghidupkan kembali ruang publik, mempererat interaksi sosial, serta membangun antusiasme warga terhadap potensi wisata lokal. Seluruh rangkaian kegiatan ini dirancang tidak hanya untuk mengaktifkan kembali potensi wisata, tetapi juga menanamkan kesadaran kolektif terhadap nilai aset desa yang dimiliki.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pengabdian ini berupaya menjawab beberapa permasalahan mendasar terkait revitalisasi desa wisata di Desa Alas Sumur. Permasalahan pertama berkaitan dengan peran perangkat desa dalam proses revitalisasi kawasan desa wisata, mengingat posisi strategis mereka sebagai pengambil kebijakan dan koordinator kegiatan masyarakat. Permasalahan kedua fokus pada strategi edukasi dan aksi kolaboratif yang dapat membangkitkan kembali semangat perangkat desa dalam mengelola desa wisata, terutama setelah mengalami periode stagnasi yang cukup panjang. Sementara itu, permasalahan ketiga mengkaji sejauh mana pendekatan *pentahelix* dapat mendukung upaya revitalisasi desa wisata melalui sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media.

Pengabdian ini memberikan manfaat pada dua dimensi utama. Secara teoritis, artikel ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian pemberdayaan desa berbasis kolaborasi multipihak dalam konteks pariwisata, khususnya dalam mengisi celah literatur mengenai peran perangkat desa

sebagai agen perubahan dalam revitalisasi destinasi wisata pedesaan. Kontribusi teoritis ini diharapkan dapat memperkaya diskusi akademik mengenai model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Dari sisi praktis, hasil pengabdian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah desa dan pelaku program pengabdian masyarakat, dalam merancang program yang efektif untuk menghidupkan kembali potensi wisata lokal. Keberhasilan revitalisasi desa wisata melalui pendampingan penguatan peran perangkat desa ini diharapkan tidak hanya mampu menghidupkan kembali aktivitas wisata lokal, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal di tingkat desa.

METODE

Desa Alas Sumur, desa ini merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Nama "*Alas Sumur*" sendiri mengandung makna historis dan filosofis, Alas Sumur berasal dari "alas" artinya hutan dan "sumur" adalah sumur, desa Alassumur berjarak sekitar 14,5 km dari Ibukota Kabupaten Bondowoso sedangkan dari Kecamatan berjarak 4 km, dengan ketinggian 406 Mdpl, luas 3,20 km² dengan lintang 07059'31" dan bujur 113052'10". Curah hujan antara 2000-2500 Ml/Tahun, Suhu Rata-rata 19-28°C. Sebelah barat desa berbatasan Desa Jambeanaom dan Pucanganom, dan Sebelah timur berbatasan dengan Desa Maskuning Kulon dan Sukokerto, dan Sebelah selatan, desa berbatasan dengan Desa Sumber Jruk dan Sebelah utara berbatasan dengan Desa Mengok, Pengarang, dan Kejayan. Desa Alassumur Terdiri dari 6 Dusun yakni Dusun Krajan, Dusun Lucu Krajan, Dusun Taman, Dusun Taman Indah, Dusun Alassumur Utara, Dusun Alassumur Selatan. Desa ini memiliki 9 Rukun Warga (RW) dan 26 Rukun Tetangga (RT), dengan jumlah penduduk sebanyak 2241 jiwa dengan Laki-laki 1159 dan perempuan 1082 jiwa. Kondisi geografis ini menjadikan Desa Alas Sumur cocok untuk sektor pertanian, peternakan, dan pengembangan wisata alam berbasis edukasi. Struktur lahan yang didominasi oleh sawah, kebun, dan area rawa memberikan potensi besar dalam pengelolaan sumber daya lokal.

Dalam pengembangan jangka panjang, Desa Alas Sumur berkomitmen mengembangkan konsep Desa Wisata Berbasis Edukasi dan Kolaborasi. Dengan pendekatan ABCD (*Asset-Based Community Development*) dan strategi *Pentahelix*, desa ini ingin mengangkat seluruh aset lokal baik alam, budaya, maupun sumber daya manusia sebagai fondasi menuju desa mandiri, lestari, dan berdaya sain. Pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) merupakan model pengembangan masyarakat yang berfokus pada penguatan aset lokal dibandingkan dengan mengidentifikasi kekurangan atau masalah. Konsep ini menekankan bahwa setiap komunitas memiliki sumber daya, kekuatan, dan potensi unik yang dapat dioptimalkan untuk menciptakan perubahan positif dari dalam dengan bantuan eksternal. pendekatan ABCD mendorong masyarakat untuk mengenali, menghargai, dan menggerakkan apa yang mereka miliki. ABCD dibangun atas aset-aset yang ditemukan di dalam komunitas dan mobilisasi individu, asosiasi, dan lembaga untuk bersatu guna mewujudkan dan mengembangkan kekuatan mereka. Pengetahuan aset desa merupakan salah satu alternatif yang digunakan dalam konsep ABCD. Aset yang dimaksud dalam hal ini bermakna potensi yang dipunyai oleh masyarakat yang menjadi sarana untuk melakukan program pengembangan desa. Salah satu kekuatan utama pendekatan ABCD adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek yang berperan penting dalam menginisiasi, merancang, dan mengelola program pembangunan.

Pendekatan aksi adalah sebuah metode atau cara dalam pelaksanaan kegiatan yang menekankan pada tindakan langsung (*action*) sebagai bagian dari proses pembelajaran sosial. Dalam pendekatan ini, teori atau perencanaan tidak hanya dijadikan dasar berpikir, tetapi juga segera diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan perubahan langsung di lapangan, sekaligus menjadi bahan refleksi untuk perbaikan berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan kekuatan dan aset yang dimiliki oleh masyarakat sebagai titik awal pengembangan program kerja, bukan semata-mata pada masalah atau kekurangannya. Masyarakat diajak langsung melakukan tindakan nyata, sekaligus membangun kesadaran tentang potensi dan arah pengembangan desa.

Aset dalam pengembangan desa merupakan potensi yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Aset Sumber Daya Alam (SDA) mencakup segala kekayaan alam seperti tanah, air, hutan, pertanian, dan keindahan alam yang dapat menjadi daya tarik wisata atau sumber penghidupan masyarakat. Sementara itu, aset Sumber Daya Manusia (SDM) merujuk pada kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan warga desa yang dapat diandalkan dalam berbagai bidang, mulai dari pertanian, kerajinan, hingga pelayanan wisata. Kedua aset ini menjadi dasar penting dalam mendorong kemandirian dan pengembangan desa berbasis potensi lokal. Selain itu, terdapat pula aset infrastruktur yang mencakup fasilitas fisik seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan sarana komunikasi yang menunjang kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial. Aset ekonomi mencakup aktivitas usaha masyarakat seperti UMKM, pertanian, perdagangan, dan jasa yang mendukung roda perekonomian desa. Tak kalah penting adalah aset sosial budaya yang mencerminkan nilai, tradisi, kesenian, dan gotong royong masyarakat desa yang menjadi identitas sekaligus kekuatan dalam membangun solidaritas dan daya tarik budaya. Keseluruhan aset ini saling berkaitan dan menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

HASIL

Desa wisata merupakan desa yang memiliki potensi daya tarik sendiri untuk dijadikan sebagai destinasi wisata, baik dari alam, budaya, atau buatan manusia yang digunakan untuk kepentingan aspek ekonomi, sosial, serta melestarikan lingkungan. Menurut peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010, desa wisata merupakan salah satu bentuk perpaduan dari atraksi, akomodasi, serta fasilitas pendukung yang ada pada suatu struktur kehidupan masyarakat yang sesuai dengan tradisi yang ada pada masyarakat. Pengelolaan desa wisata dilakukan dengan pendekatan ***community-based tourism*** yang mengikutsertakan masyarakat sebagai pengelola utama. Menurut Kemenparekraf, terdapat tiga aspek utama dalam membangun desa wisata yang harus ada agar suatu desa dapat dikembangkan menjadi desa wisata, yaitu memiliki potensi wisata yang layak dikembangkan, adanya keterlibatan masyarakat lokal dalam mengelola dan mengembangkan destinasi wisata yang ada pada desa tersebut, dan terdapat suatu konsep yang menjadi ciri khas pada desa tersebut dan mampu menarik wisatawan melalui ciri khas yang tidak dimiliki oleh wisata lain.

Menurut kemenparekraf (2021) terdapat empat tahap dalam mengembangkan desa wisata:

1. Desa Wisata Rintisan, yaitu desa wisata yang masih berbentuk potensi, belum mempunyai produk, belum ada kunjungan dari wisatawan, sarana prasarana yang dimiliki juga masih terbatas, serta masyarakat yang belum memiliki tingkat kesadaran.
2. Desa Wisata Berkembang, yaitu desa wisata yang masih berbentuk potensi, namun mulai dikembangkan lebih jauh, dan sudah bisa menerima wisatawan.
3. Desa Wisata Maju, yaitu masyarakat yang sudah bisa mengelola pariwisata dan mengelola dana desa untuk mengembangkan potensi pariwisata. Wilayah wisatanya juga sudah dikunjungi oleh banyak wisatawan.
4. Desa Wisata Mandiri, yaitu desa yang sudah terdapat inovasi pariwisata yang berasal dari Masyarakat. Pengelolaan wisatanya bersifat kolaboratif *pentahelix* dan memiliki sarana prasarana yang sudah terstandarisasi.

Ciri utama dari desa wisata yaitu pengelolaannya berbasis komunitas (*community based tourism*), melibatkan partisipasi yang aktif dari Masyarakat sebagai pelaksana dan penerima manfaat, sarana prasarana yang digunakan berasal dari fasilitas lokal, serta lingkungan alam dan budayanya otentik dan terjaga. Terdapat beberapa kriteria atau indikator desa wisata, yaitu:

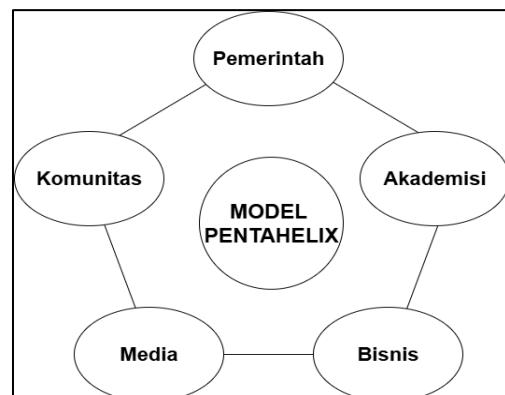
1. Terdapat potensi atau daya tarik yang dimiliki oleh wisata
2. Terdapat komunitas masyarakat
3. Terdapat potensi sumber daya manusia lokal yang ada pada aktivitas pengembangan desa wisata.
4. Terdapat lembaga pengelolaan
5. Terdapat peluang serta adanya sarana dan prasarana dasar guna mendukung wisata.
6. Terdapat potensi serta peluang untuk mengembangkan pasar wisatawan.

Pendekatan ABCD (*Asset-Based Community Development*) adalah cara membangun desa dengan memanfaatkan potensi dan kekuatan yang sudah ada di masyarakat. Dalam pendekatan ini, melihat salah satu aset paling menonjol yang ditemukan di Desa Alas Sumur adalah Wisata Rawa Indah Almour. Kawasan ini menyimpan keindahan alam yang masih alami, menjadi ruang sosial warga, dan memiliki daya tarik besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis lingkungan. Aset yang ditemukan kemudian tidak dibiarkan berdiri sendiri. Warga dan pemuda desa mulai bergerak untuk mengelolanya secara mandiri melalui Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang sudah terbentuk sebelumnya, dan didukung oleh BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa. Pokdarwis menjadi motor penggerak partisipasi warga dalam mengorganisasi kegiatan kebersihan, menjaga keamanan kawasan, serta melakukan promosi melalui media sosial. Sementara BUMDes menangani aspek perencanaan bisnis, penyediaan sarana, serta pengelolaan dana dan retribusi.

Keberadaan BUMDes dan Pokdarwis ini merupakan wujud dari aset kelembagaan desa, ini membuktikan bahwa Desa Almour punya aset SDM (sumber daya manusia) yang aktif dan peduli. kini mulai tertarik untuk kembali ke desa karena melihat peluang usaha dan perubahan positif di desa. Wisata Rawa Indah juga menjadi tempat munculnya peluang ekonomi baru. Warga mulai membuka warung, menjual makanan tradisional, menyewakan perahu kecil, dan membuat

kerajinan tangan untuk dijual ke pengunjung. Ini menunjukkan bahwa aset ekonomi masyarakat ikut tumbuh seiring berkembangnya wisata desa. Wisata Rawa Indah, BUMDes, Pokdarwis, warga yang semangat, dan pemimpin yang mendukung semuanya adalah aset. Dalam proses pengembangan desa wisata, keterlibatan berbagai pihak sangat penting agar pengelolaan pariwisata dapat berjalan secara optimal, inklusif, dan berkelanjutan. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki peran aktif dalam menggali, mengelola, dan mempromosikan potensi wisata yang dimiliki desa. Salah satu pendekatan kolaboratif yang relevan dan banyak digunakan dalam konteks tersebut adalah model *Pentahelix*, yang melibatkan lima aktor utama dalam pembangunan.

Konsep *Pentahelix* merupakan model kolaboratif yang melibatkan lima aktor utama, yaitu pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, komunitas, dan media. Kelima unsur ini bersinergi untuk mencapai tujuan bersama, dengan mengoptimalkan peran, keahlian, dan sumber daya masing-masing dalam rangka mendorong inovasi sosial dan pembangunan yang berkelanjutan.(Mardiatmi et al., 2023 (Muktiyanto dkk., 2025) . Dalam konteks pembangunan sektor tertentu seperti pariwisata, pendekatan *Pentahelix* juga dinilai efektif dalam menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan di antara para pemangku kepentingan. Halibas menyebut bahwa *Pentahelix* merupakan model pembangunan sosial ekonomi yang mendorong sinergi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam upaya mewujudkan pembangunan pariwisata yang berdaya saing (S Halibas dkk., 2017). Dengan demikian, kelima aktor dalam *Pentahelix* tidak hanya hadir sebagai pelengkap, tetapi memiliki peran strategis dan saling mendukung dalam menciptakan ekosistem kolaboratif yang inovatif dan berkelanjutan. Peran dari masing-masing elemen *Pentahelix* dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 1. Model Pentahelix

1. Pemerintah

Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator, regulator, dan pembuat kebijakan. Perannya sangat vital dalam menciptakan regulasi yang mendukung, menyediakan infrastruktur, serta

menjamin keberlanjutan program kolaboratif. Dalam banyak konteks, pemerintah juga bertindak sebagai inisiator kolaborasi lintas sektor, terutama dalam isu-isu publik seperti pengembangan UMKM, pariwisata desa, maupun mitigasi bencana (Muktiyanto dkk., 2025). Dalam konteks Desa Alas Sumur, Dinas Pariwisata Kabupaten Bondowoso memegang peran penting dalam merancang arah pengembangan desa wisata, memberikan dukungan regulatif, serta memfasilitasi promosi destinasi lokal. Pemerintah desa juga menjadi pelaksana teknis dan pemangku kebijakan di tingkat lokal yang menjembatani sinergi antara pihak.

2. Akademisi

Kalangan akademisi berkontribusi melalui penyediaan data, riset ilmiah, dan inovasi teknologi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, akademisi juga memainkan peran dalam peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan berbasis riset serta diseminasi pengetahuan kepada masyarakat dan aktor lainnya. Peran akademisi diwakili oleh mahasiswa (peneliti), yang berkontribusi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelatihan digital, serta pendampingan penguatan kapasitas kelembagaan desa. Kehadiran akademisi ini menjadi sumber pengetahuan dan inovasi yang kontekstual serta berbasis riset lapangan.

3. Bisnis

Dunia usaha memiliki sumber daya yang besar untuk mendukung implementasi program melalui investasi, jejaring pasar, serta inovasi manajerial. Peran sektor ini penting dalam mengintegrasikan aspek ekonomi dalam kolaborasi, sekaligus menjadi penggerak ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat. Sektor bisnis lokal di Desa Alas Sumur terdiri dari pelaku UMKM yang mengelola produk-produk unggulan desa seperti makanan olahan, kerajinan tangan, dan layanan berbasis wisata. Mereka berperan penting dalam menggerakkan ekonomi desa, membuka lapangan kerja, dan menciptakan nilai tambah ekonomi melalui optimalisasi potensi lokal.

4. Komunitas

Komunitas merupakan aktor akar rumput yang memiliki pengetahuan lokal, kebutuhan riil, serta potensi sosial yang khas. Keterlibatan masyarakat penting untuk memastikan keberhasilan program secara kontekstual dan partisipatif. Masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam pembangunan. Di Alas Sumur, komunitas seperti Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Karang Taruna dan Sarka Space merupakan motor penggerak kegiatan wisata, edukasi, hingga event-event kreatif. Komunitas ini turut menjaga keberlanjutan program desa wisata dan menjadi agen perubahan di tingkat lokal.

5. Media

Media berfungsi sebagai kanal informasi, edukasi, serta kontrol sosial. Perannya sangat signifikan dalam menyebarkan gagasan, memperluas jangkauan pesan kolaboratif, serta membangun kesadaran publik. Media juga menjadi jembatan antara aktor-aktor lain dan

publik luas, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas proses kolaborasi. Desa Alas Sumur telah memanfaatkan berbagai platform media seperti website desa, akun Instagram resmi, dan kanal YouTube untuk mempublikasikan kegiatan, mempromosikan potensi wisata, serta membangun citra positif desa di ruang digital. Kehadiran media ini turut mendukung transparansi, edukasi, serta perluasan jejaring kolaborasi.

Melalui kolaborasi yang solid antar kelima unsur tersebut, pendekatan *Pentahelix* menjadi solusi strategis untuk mendorong pembangunan berbasis inovasi, inklusivitas, dan keberlanjutan. Model ini semakin relevan digunakan di berbagai konteks, seperti pengembangan ekonomi lokal, revitalisasi desa wisata, manajemen lingkungan, hingga mitigasi bencana (Handayani et al., 2024; Mardiatmi et al., 2023).

Namun, keberhasilan kolaborasi lima aktor tersebut sangat bergantung pada bagaimana struktur dan elemen lokal di desa mampu menerjemahkan serta menjalankannya secara konkret. Di sinilah peran stakeholder desa menjadi sangat penting dan perlu dipahami secara lebih rinci. Stakeholder desa merupakan seluruh elemen yang memiliki pengaruh dan kepentingan dalam proses pembangunan desa, baik dari unsur pemerintahan desa maupun organisasi masyarakat. Dalam konteks pengembangan desa berbasis kolaborasi, para pemangku kepentingan lokal ini memegang peranan penting dalam merumuskan arah kebijakan, mengelola potensi desa, serta memastikan keberlanjutan program pembangunan yang partisipatif. Pengembangan desa wisata pun tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan aktif berbagai stakeholder di tingkat lokal (Nadhif dkk., t.t.)

Perangkat desa sebagai struktur pemerintahan tingkat desa, memiliki peran utama dalam merancang dan mengeksekusi kebijakan pembangunan. Kepala desa, sekretaris desa, dan kepala-kepala urusan lainnya bertugas menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), serta menjembatani aspirasi masyarakat. Dengan kewenangan administratif dan kedekatan langsung dengan warga, perangkat desa menjadi aktor kunci dalam menentukan arah pembangunan, termasuk dalam merancang program revitalisasi wisata (Nugroho & Rahman, t.t.). Tanpa keterlibatan aktif dari perangkat desa, upaya pengembangan desa wisata berisiko tidak berkelanjutan karena minim dukungan struktural dan legitimasi formal. Dalam kerangka *pentahelix*, perangkat desa termasuk dalam unsur pemerintah yang memiliki peran strategis dalam menjalin koordinasi lintas aktor.

Lembaga desa lainnya seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) juga menempati posisi vital. BUMDes menjadi pilar ekonomi desa melalui pengelolaan usaha lokal, pengembangan produk unggulan, dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sementara itu, Pokdarwis berperan sebagai pengelola dan promotor kegiatan wisata desa. Mereka tidak hanya mengorganisasi kegiatan wisata, tetapi juga mendorong partisipasi warga dan menjalin kemitraan dengan pelaku usaha serta pihak eksternal. Pokdarwis menjadi ujung tombak dalam menciptakan pengalaman wisata yang berbasis kearifan lokal dan komunitas, sekaligus mendukung terbentuknya desa wisata yang inklusif, kreatif, dan berdaya saing (Wiyono, t.t.). Dalam konteks Desa Alas Sumur, peran lembaga-lembaga ini masih perlu ditumbuhkan kembali seiring proses revitalisasi yang sedang dimulai.

Selain lembaga formal, organisasi kemasyarakatan juga memiliki peran penting dalam ekosistem pembangunan desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), misalnya, menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam mendampingi pelaksanaan pembangunan fisik dan nonfisik, menyerap aspirasi warga, serta mensosialisasikan program desa. Kelompok PKK turut berkontribusi dalam bidang sosial, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan seperti posyandu, pelatihan ibu rumah tangga, dan edukasi kesehatan keluarga. Karang Taruna sebagai wadah pemuda berperan dalam pengembangan generasi muda melalui kegiatan sosial, budaya, dan kewirausahaan.

Peran pemuda dan komunitas lokal menjadi sangat penting, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, inovasi promosi, serta pelestarian nilai budaya dan lingkungan. Dalam studi ini, keterlibatan pemuda Desa Alas Sumur tampak dalam kegiatan bersih-bersih kawasan wisata dan lomba memancing, yang menunjukkan kuatnya modal sosial sebagai aset dalam pendekatan ABCD (*Asset-Based Community Development*). Kelompok tani, lembaga adat, dan komunitas budaya juga termasuk dalam jajaran stakeholder lokal yang memiliki kekuatan sosial dan budaya, serta sering menjadi pengelola langsung potensi lokal seperti pertanian, kearifan tradisional, dan pariwisata.

Kolaborasi antara perangkat desa dan seluruh elemen masyarakat ini mencerminkan prinsip *governance* yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan riil warga. Dalam perspektif *pentahelix*, stakeholder desa dapat dikaitkan dengan dua unsur dominan: pemerintah (perangkat desa, dinas pariwisata) dan komunitas (warga, tokoh adat, pemuda, organisasi lokal). Ketika perangkat desa membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan komunitas, maka proses pemberdayaan akan berjalan lebih partisipatif dan berkelanjutan. Studi Paristha dalam pengembangan Desa Wisata Kerta juga menegaskan pentingnya sinergi antar stakeholder melalui model *pentahelix*, di mana masyarakat lokal menjadi aktor utama dan didukung oleh perguruan tinggi, pemerintah, pelaku usaha, dan media. Masing-masing pihak memainkan peran khasnya mulai dari konseptor, fasilitator, promotor, hingga penyedia infrastruktur dengan tujuan memperkuat kapasitas desa dalam mengelola potensi pariwisata secara berkelanjutan.(Paristha dkk., 2022)

Dalam Pengabdian di Desa Alassumur, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, diterapkan pendekatan kolaboratif berbasis model *pentahelix* dengan fokus utama pada penguatan peran stakeholder desa, khususnya perangkat desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Strategi ini dipilih untuk mendukung revitalisasi potensi wisata Rawa Indah Almour melalui keterlibatan aktif elemen lokal yang memiliki kapasitas dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan desa. Kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mendorong proses pemberdayaan kelembagaan desa secara berkelanjutan. Perangkat desa menjadi mitra utama dalam pelaksanaan program kerja. Mahasiswa berupaya membangun komunikasi dua arah dengan aparatur desa untuk menggali kebutuhan serta menyelaraskan kegiatan dengan arah pembangunan desa. Bentuk konkret kolaborasi ini terlihat dalam kegiatan belajar bersama stakeholder desa, di mana mahasiswa memfasilitasi diskusi tentang strategi pengembangan wisata, pengelolaan aset desa, serta pentingnya sinergi antar lembaga desa. Selain itu, juga mengadakan pelatihan pembuatan dan pengelolaan website desa yang diikuti oleh perangkat desa dan pengurus BUMDes, dengan tujuan meningkatkan kapasitas digital dan

memperluas akses informasi publik.

Pokdarwis sebagai aktor penggerak pariwisata lokal turut dilibatkan dalam berbagai kegiatan lapangan, seperti kerja bakti pembersihan kawasan wisata Rawa Indah Almour. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan memperbaiki tampilan fisik kawasan wisata, tetapi juga membangun kembali semangat gotong royong dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan desa. Sementara itu, kolaborasi dengan BUMDes diarahkan pada penguatan unit usaha yang mendukung aktivitas wisata. Dukungan terhadap BUMDes tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut aspek penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem dokumentasi digital. Sebagai bentuk pendekatan kultural dan hiburan masyarakat, Pengabdian ini juga mengadakan lomba memancing di kawasan wisata Almour yang melibatkan warga dari berbagai dusun. Lomba ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali kawasan wisata sekaligus mempererat hubungan antara masyarakat dan perangkat desa dalam suasana kebersamaan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan masyarakat, kapasitas lembaga desa, dan peluang pengembangan sektor wisata secara partisipatif.

Secara keseluruhan, penerapan model *pentahelix* dalam pengabdian ini lebih ditekankan pada penguatan internal desa melalui pelibatan aktif perangkat desa, BUMDes, dan Pokdarwis. Kolaborasi ini mendorong terciptanya sistem pengelolaan wisata yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan memperkuat kapasitas aktor lokal, diharapkan Desa Alassumur dapat membangun ekosistem pariwisata berbasis komunitas yang tidak hanya menggugah ekonomi desa, tetapi juga memperkuat struktur kelembagaan di tingkat akar rumput. Untuk merealisasikan pendekatan tersebut, sejumlah program kerja yang dirancang secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat desa. Program-program ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengedepankan nilai partisipatif sebagai wujud nyata penerapan *pentahelix* di tingkat lokal.

Salah satu program utama dalam kegiatan pengabdian ini adalah pelaksanaan edukasi bersama perangkat desa yang bertujuan untuk membangun pemahaman kolektif mengenai pentingnya pengelolaan desa wisata secara berkelanjutan. Edukasi ini disusun dalam dua sesi utama yang saling melengkapi. Pada sesi pertama, materi difokuskan pada pengenalan konsep dasar desa wisata, syarat-syarat terbentuknya desa wisata, serta pembahasan mengenai model kolaborasi multipihak melalui pendekatan *pentahelix*. Acara belajar bersama ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat desa, mulai dari perangkat desa, anggota Pokdarwis setempat, tokoh masyarakat, hingga para pemuda desa yang menunjukkan antusiasme tinggi terhadap pengembangan wisata lokal. Keterlibatan lintas elemen ini menunjukkan semangat kolaborasi yang menjadi pondasi penting dalam pengembangan desa wisata, indikator keberhasilan sebuah desa wisata menurut standar Kemenparekraf, serta peran strategis yang dapat diambil oleh perangkat desa dalam mendorong kolaborasi lintas sektor. Pendekatan *pentahelix* turut dijelaskan sebagai kerangka kolaboratif yang mencakup lima unsur utama: pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media. Perangkat desa didorong untuk tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai fasilitator sinergi antar unsur tersebut di tingkat desa.



Gambar 2. Belajar Bersama (Dinas pariwisata)

Sesi kedua dari kegiatan edukasi difokuskan pada pelatihan pengelolaan website desa dan penulisan artikel berita. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam mengelola website resmi desa secara mandiri, profesional, dan berkelanjutan. Melalui pelatihan ini, peserta tidak hanya dibekali dengan keterampilan teknis dasar pengelolaan konten dan penulisan berita desa, tetapi juga diajak merancang sistem yang lebih inklusif dan kolaboratif. Salah satu usulan yang mengemuka adalah membuka partisipasi masyarakat dalam bentuk kontribusi konten, seperti berita kegiatan, dokumentasi potensi lokal, hingga cerita-cerita khas desa yang dapat dimuat di website.



Gambar 3. Belajar Bersama (Pokdarwis)

Selain kegiatan edukatif, bentuk implementasi *pentahelix* juga tercermin dalam kegiatan aksi kolaboratif yang melibatkan peran aktif masyarakat dan pemerintah desa dalam menghidupkan kembali ruang publik dan objek wisata desa. Aksi kolaboratif merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama oleh berbagai pihak untuk mencapai tujuan dan hasil yang efektif dan berkelanjutan. Aksi nyata dibutuhkan sebagai upaya dalam meningkatkan potensi desa wisata dan dapat meningkatkan keterlibatan aktif dari masyarakat. Salah satu bentuk aksi kolaboratif yang dilakukan adalah kegiatan bersih-bersih almour. Kegiatan ini dirancang sebagai langkah awal dalam membangun kesadaran kolektif untuk membangun semangat gotong royong antara

perangkat desa dan masyarakat. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kembali kesadaran masyarakat agar lebih menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan sekaligus menunjukkan bahwa potensi yang ada pada wisata almour masih layak untuk dikembangkan dan dikunjungi oleh wisatawan lagi. Dengan adanya semangat gotong royong serta adanya keterlibatan aktif dan partisipasi dari warga, kegiatan bersih-bersih ini dapat digunakan sebagai langkah awal yang strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan.

Didalam rangkaian kegiatan bersih bersih almour untuk semangat membangkitkan kembali potensi Desa Wisata Almour, Wisata Rawa Indah Almour bekerja sama dengan Sarka Space Spac. Tujuan dari kerjasama ini memperkuat kolaborasi lintas komunitas. Sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga lingkungan dan mendorong revitalisasi kawasan wisata lokal. Kegiatan ini menjadi langkah awal yang konkret untuk mewujudkan semangat Almour Reborn yakni membangkitkan kembali potensi wisata Desa Almour yang sempat tertidur. Kolaborasi ini tidak hanya sebatas aksi simbolik, tetapi menjadi bagian dari gerakan berkelanjutan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Sarka Space membawa pendekatan edukatif dalam aksi ini, dengan mengajak masyarakat untuk memilah sampah, mengenali jenis limbah. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran ekologis sejak dini. Melalui pendekatan aksi kolaboratif, kegiatan ini menjadi ruang temu antarwarga, dengan dukungan dari Sarka Space sebagai mitra penggerak lingkungan, kegiatan ini menjadi titik tolak menuju transformasi wisata Almour yang lebih hijau dan berdaya saing. Setiap kantong sampah yang dikumpulkan adalah bentuk nyata kontribusi terhadap perubahan yang lebih besar.



Gambar 4. Kegiatan Bersih Bersih Almour

Seperti kegiatan dalam kegiatan kerja belajar dan sosialisasi web, warga tidak hanya hadir sebagai peserta pasif, tetapi juga turut menyumbangkan gagasan kreatif untuk pengelolaan informasi dan branding desa melalui media digital. Dalam kegiatan bersih-bersih desa wisata yang berkolaborasi dengan Sarka Space mengajak warga untuk memahami jenis-jenis sampah, proses daur ulang, hingga pentingnya sistem pengelolaan limbah secara berkelanjutan. Warga diajak bukan hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai pemilik solusi. Memulai dari hal yang paling kecil untuk memilah sampah yakni, organik, dan anorganik. Kegiatan lomba mancing pun tidak luput dari nilai kolaborasi ini. Bersama Sarka Space, lomba ini dirancang tidak hanya sebagai ajang hiburan, tetapi juga kampanye ramah lingkungan. Edukasi tentang pelestarian melalui pemilahan sampah yang diterapkan kepada, peserta lomba, penonton dan UMKM yang berjualan sehingga

kegiatan ini menjadi sarana penyadaran yang menyenangkan.

PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat pada potensi wisata Rawa Indah Almour di Desa Alas Sumur dengan menekankan pendekatan edukatif dan kolaboratif berbasis Asset Based Community Development (ABCD). Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pemanfaatan aset lokal yang melibatkan perangkat desa, BUMDes, dan POKDARWIS mampu memperkuat kapasitas kelembagaan desa serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata desa secara berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Kretzmann dan McKnight yang menekankan bahwa pembangunan berbasis aset lebih efektif dalam mendorong kemandirian komunitas dibandingkan pendekatan berbasis kebutuhan (needs-based).

Proses pengabdian ini memperlihatkan bahwa edukasi desa wisata dan penguatan literasi digital berperan sebagai instrumen penting dalam membangun kesadaran kritis masyarakat. Hal tersebut mendukung teori pemberdayaan masyarakat (community empowerment) yang menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan dan keterampilan menjadi prasyarat utama terjadinya partisipasi aktif dan perubahan sosial. Peningkatan kapasitas digital perangkat desa dan POKDARWIS memperkuat fungsi komunikasi dan promosi wisata, sehingga masyarakat mampu mengelola informasi secara mandiri dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Kolaborasi antar lembaga desa yang terbangun selama proses pengabdian menunjukkan adanya penguatan modal sosial (social capital) dalam masyarakat. Kegiatan partisipatif seperti kerja bakti pembersihan kawasan wisata dan lomba memancing menjadi ruang interaksi sosial yang memperkuat kepercayaan, norma, dan jaringan kerja antar warga dan kelembagaan desa. Temuan ini relevan dengan teori modal sosial Putnam yang menekankan pentingnya jejaring dan kepercayaan dalam mendukung keberhasilan pembangunan berbasis komunitas.

Pengabdian masyarakat ini menunjukkan pergeseran paradigma masyarakat dari posisi pasif menjadi aktor aktif dalam pengelolaan wisata desa. Pada tahap awal, masyarakat cenderung memandang kawasan wisata hanya sebagai ruang rekreasi, namun melalui proses pendampingan dan edukasi berkelanjutan, tumbuh kesadaran kolektif bahwa wisata desa merupakan aset strategis yang perlu dijaga dan dikelola bersama. Perubahan ini mencerminkan proses transformasi sosial yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan, sebagaimana dikemukakan dalam teori pembangunan partisipatif.

Secara keseluruhan, bahwa integrasi pendekatan ABCD, edukasi, dan kolaborasi lintas kelembagaan mampu menghasilkan temuan teoretis berupa penguatan kapasitas komunitas, peningkatan modal sosial, serta terbentuknya kesadaran kolektif sebagai fondasi perubahan sosial. Temuan ini memperkaya kajian pengabdian masyarakat berbasis wisata desa dan memperkuat literatur mengenai pentingnya pendekatan berbasis aset dan kolaborasi dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pada program pengembangan desa wisata ini, telah menggunakan strategi edukasi serta aksi kolaboratif yang sudah terbukti dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi perangkat desa. Pendekatan edukatif yang digunakan telah dikombinasikan dengan keterlibatan langsung dalam kegiatan lapangan, seperti kegiatan bersih-bersih dan lomba mancing. Dimana perangkat desa menunjukkan peningkatan terkait pentingnya melakukan pengelolaan wisata berbasis komunitas. Kegiatan tersebut juga dapat membangun rasa tanggung jawab terhadap potensi wisata lokal.

Revitalisasi potensi wisata Rawa Indah Almour di Desa Alas Sumur menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif melalui model *pentahelix* dapat memberikan dampak positif dalam pengembangan desa wisata. Melalui keterlibatan aktif perangkat desa, BUMDes, dan komunitas lokal, berbagai kegiatan telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Program Almour Reborn menjadi contoh nyata bagaimana sinergi antara berbagai elemen dapat mendorong pengelolaan sumber daya lokal secara berkelanjutan.

Hasil dari kegiatan edukasi dan aksi kolaboratif menunjukkan bahwa masyarakat kini lebih memahami nilai ekonomi dan sosial dari potensi wisata yang ada. Pelatihan pengelolaan website desa dan penulisan artikel berita berhasil meningkatkan kapasitas digital perangkat desa, sehingga informasi mengenai wisata dapat disebarluaskan dengan lebih efektif. Kegiatan bersih-bersih dan lomba mancing tidak hanya memperbaiki kondisi fisik kawasan wisata, tetapi juga membangun semangat gotong royong di antara masyarakat. Penerapan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) dalam program ini memberi penekanan pada kekuatan dan aset yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan mengenali dan mengoptimalkan potensi lokal, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai subjek dalam proses pembangunan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan revitalisasi memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap potensi desa.

Keberhasilan program ini juga menunjukkan pentingnya dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan media. Sinergi antara aktor-aktor ini sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan pengembangan desa wisata. Dengan adanya dukungan regulatif dan promosi yang baik, potensi wisata Rawa Indah Almour dapat berkembang lebih optimal dan berdaya saing. Akhirnya, program Almour Reborn menjadi langkah awal yang signifikan dalam membangun desa yang mandiri dan berkelanjutan. Ke depan, diperlukan upaya lanjutan dalam memperkuat kapasitas kelembagaan desa dan meningkatkan keterlibatan masyarakat.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Desa Alas Sumur atas dukungan dan kerja sama yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang telah berpartisipasi aktif dan berkolaborasi dalam pengembangan kawasan wisata Rawa Indah Almour. Apresiasi yang tinggi diberikan kepada masyarakat Desa Alas Sumur atas keterlibatan, antusiasme, dan kontribusi yang sangat berarti dalam mendukung keberhasilan program pengabdian masyarakat ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moril maupun materiil, sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Adiwilaga, R., & Millah, R. S. (t.t.). *KONSEP DESA WISATA DAN POSISI PEMERINTAH DESA: SEBUAH KAJIAN TEORITIS*. 7(2).
- Fitrianto, A. R., Amaliyah, E. R., Safitri, S., Setyawan, D., & Arinda, M. K. (2020). Pendampingan dan Sosialisasi pada Usaha Toko Kelontong dengan Metode ABCD (Asset Based Community Development) Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Literasi Usaha Toko Kelontong. *Jurnal Abdidas*, 1(6), 579–591. <https://doi.org/10.31004/abdidias.v1i6.120>
- Institut Teknologi Bandung, Maghfira, S., Pratiwi, W. D., & Institut Teknologi Bandung. (2024). KOLABORASI DAN SINERGITAS PERAN PENTAHelix DALAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PULAU PRAMUKA KEPULAUAN SERIBU. *Warta Pariwisata*, 22(2), 61–66. <https://doi.org/10.5614/wpar.2024.22.2.04>
- Jember, D. P. (2021, September). *Empat Tahap Membangun Desa Wisata Menurut Kemenparekraf RI*. Dipetik Juli 2025, dari <https://dpmd.jemberkab.go.id/desa-wisata/16/empat-tahap-membangun-desa-wisata-menurut-kemenparekraf-ri>
- Krisnawati, I. (t.t.). *Program Pengembangan Desa Wisata Sebagai Wujud Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Covid dan Implementasinya (Sebuah Studi Literatur)*.
- Millah, R. A. (2023, April). Konsep Desa Wisata dan Posisi Pemerintah Desa: Sebuah Kajian Teoritis. *Jurnal JISIPOL*, 7.
- Mukti, A. B. (2020). ‘<http://stp-mataram.e-journal.id/JHI>’. *Hospitality*, 9 (1), 1-7.
- Muktiyanto, D., Widagdo, S., Istiqomah, M., & Parmawati, R. (2025). Penta Helix Collaboration Model Involving Reserve Component Personnel in Disaster Resilience in Malang Regency. *Nature Environment and Pollution Technology*, 24(1), D1665. <https://doi.org/10.46488/NEPT.2025.v24i01.D1665>
- Nadhif, N. I., Subowo, A., & Santoso, R. S. (t.t.). *PERAN STAKEHOLDERS DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA GOGIK DI KABUPATEN SEMARANG*
- Nugroho, A. Y., & Rahman, A. Z. (t.t.). *PERAN STAKEHOLDERS DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA NONGKOSAWIT KOTA SEMARANG*.
- Paristha, N. P. T., Arida, I. N. S., & Bhaskara, G. I. (2022). Peran Stakeholder dalam Pengembangan Desa Wisata Kerta Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 625. <https://doi.org/10.24843/JUMPA.2022.v08.i02.p13>
- Rijal, N. K., & Saputro, L. K. P. (2024). Multistakeholder collaboration in environmental challenges at the local level: A study of Ngalam Petengan as an initiative from global civil society. *JANUS NET E-Journal of International Relation*, 15(1). <https://doi.org/10.26619/1647-7251.15.1.15>
- Rinawati, A., Arifah, U., & H, A. F. (2022). Implementasi Model Asset Based Community Development (ABCD) dalam Pendampingan Pemenuhan Kompetensi Leadership

- Pengurus MWC NU Adimulyo. *Ar-Riqliyah: Jurnal Inovasi Pengembangan Pendidikan Islam*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.33507/ar-riqliyah.v7i1.376>
- Rusyidi, B., & Fedryansah, M. (2018). *PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT*. 1(3).
- S Halibas, A., Ocier Sibayan, R., & Lyn Maata, R. (2017). The Penta Helix Model of Innovation in Oman: An HEI Perspective. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management*, 12, 159–174. <https://doi.org/10.28945/3735>
- Wicaksono, A. D., Agustina, D., & Hidayat, Ar. R. T. (2023). Pentahelix Model for Eco-Industrial Development: A Collaborative Policy Approach. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(09), 2673–2683. <https://doi.org/10.18280/ijsdp.180906>
- Wijayanti, A. (2022). Identifikasi Indikator Kinerja Pengelolaan Desa Rintisan, Study kasus Desa Wisata Karang, Trimulyo, Sleman. *Journal of Tourism and Economic*, 5, 130-146.
- Wiwin, I. W. (t.t.). *Community Based Tourism Dalam Pengembangan Pariwisata Bali*.
- Wiyono, K. F. P. (t.t.). *PERAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) RUKUN SANTOSO DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA WISATA LEREK KABUPATEN SEMARANG*.
- Yulianti, R., & Andriani, M. (2023). *POLA KETERLIBATAN UNSUR PENTAHelix DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA (STUDI PADA DESA WISATA TAMBAKSARI, KECAMATAN WANAREJA, CILACAP)*. 9.